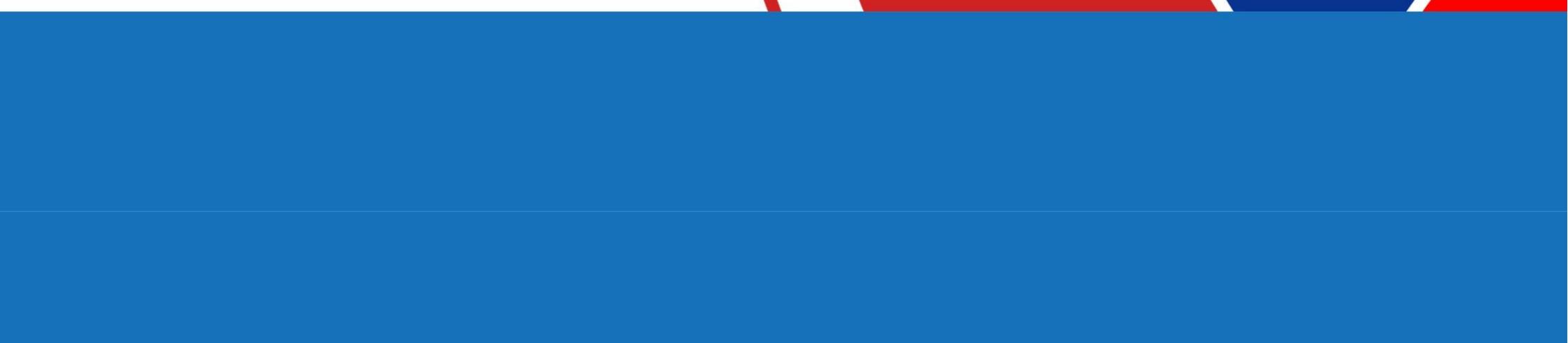


Pendampingan Persiapan dan Penyusunan Dokumen Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD)



Latar Belakang

Saat ini, berbagai permasalahan masih menyelimuti pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut diantaranya anggaran yang terbatas untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, aturan keuangan daerah yang menghambat kelancaran kegiatan pelayanan publik, sulitnya mengukur kinerja pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan alur birokrasi yang terlalu panjang yang menghambat pelayanan publik.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini sangat diperlukan bagi UPT/D yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, pada pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terbitnya permendagri tersebut kemudian menandai diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). PPK-BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan beberapa pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. UPT/D yang ingin menerapkan PPK BLUD harus memenuhi persyaratan substantif (tugas dan fungsi bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik), teknis (memenuhi kriteria layak dari sisi manfaat dan berpotensi dari sisi keuangan), dan administratif (menyajikan beberapa dokumen yang telah ditentukan). Dilihat dari persyaratan substantif setiap UPT/D harus merupakan penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, termasuk layanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, perdagangan, pariwisata, kebersihan, dan penyediaan bibit/pupuk. Salah satu UPT/D yang berada di bawah dinas kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

RSUD merupakan instansi pemerintah yang mendapatkan tugas melayani kesehatan masyarakat. RSUD juga harus mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dan adil demi terciptanya kualitas pelayanan kesehatan yang baik. RSUD berkewajiban memberikan pertanggungjawaban mengenai segala tindakannya kepada masyarakat terkait dengan kinerja layanannya. RSUD dapat melakukan Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk mencapai prinsip akuntabilitas. PPK-BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan beberapa pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

UPT/D yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi 3 persyaratan yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif. Namun, saat proses persiapan menerapkan BLUD, UPT/D mengalami beberapa kendala, yaitu:

- **UPT/D mengalami kendala dalam langkah-langkah untuk menerapkan BLUD**
- **UPT/D mengalami kendala dalam penyusunan dokumen persyaratan administratif untuk penerapan BLUD yang terdiri dari :**



Solusi Permasalahan BLUD



Berdasarkan permasalahan tersebut, RSUD memerlukan pendampingan dalam menjalankan tahapan

- persyaratan,
- permohonan,
- penilaian dan
- persetujuan menerapkan BLUD oleh kepala daerah.

Untuk mendukung hal tersebut kami memiliki layanan berupa:

Pendampingan Persiapan Dan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD

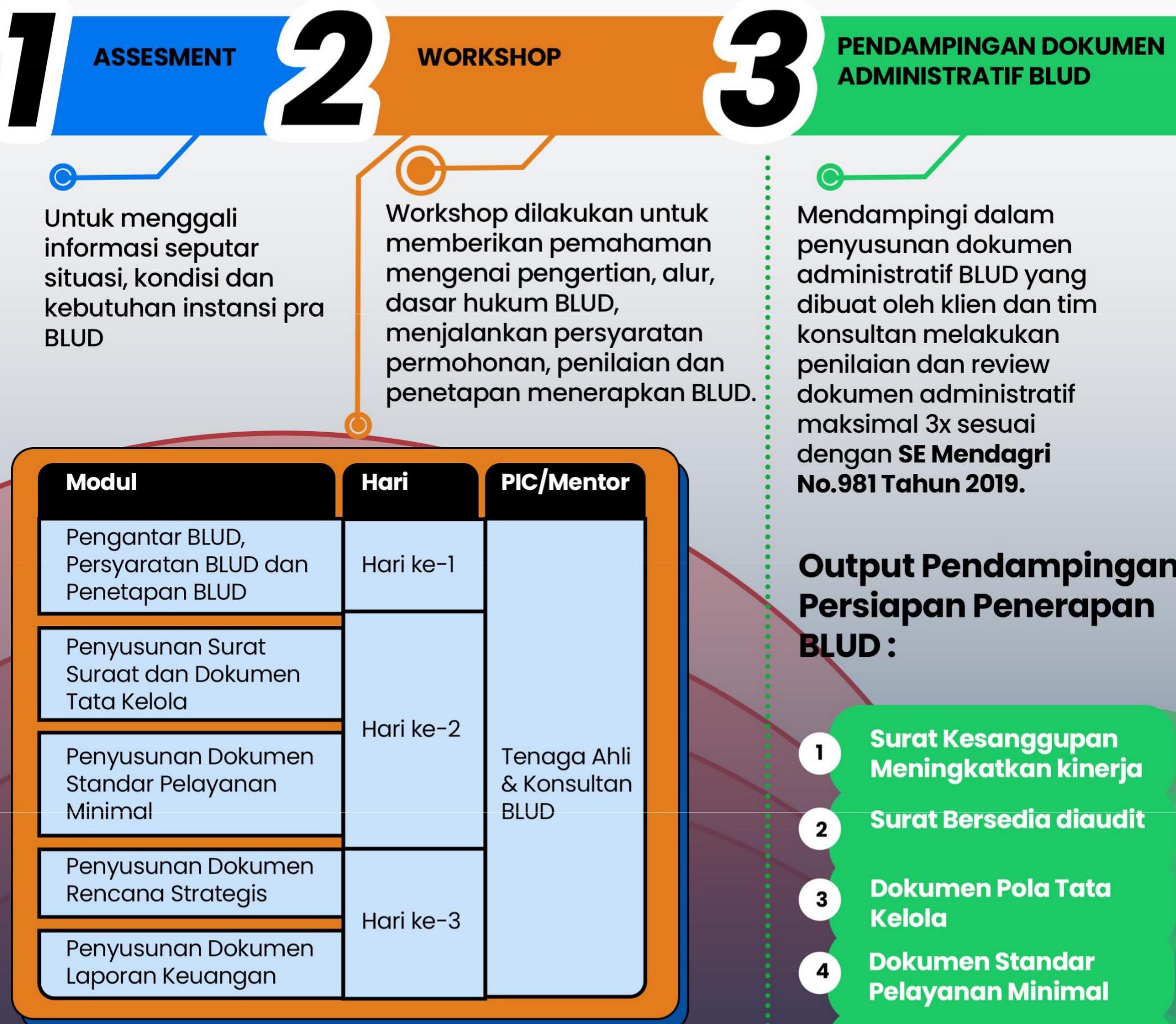
RSUD yang hendak menerapkan BLUD memerlukan penyusunan dokumen administratif. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dalam Menyusun dokumen administratif. Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan Rumah Sakit mampu menerapkan BLUD sesuai dengan **Permendagri No.79 Tahun 2018**. Sehingga kinerja Rumah Sakit menjadi lebih efisien dan efektif.



Rincian Layanan Pra BLUD

1. Rincian Layanan Pendampingan Persiapan BLUD :

Pendampingan
Selama ± 4 bulan



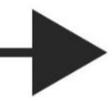
Output Pendampingan Persiapan Penerapan BLUD :

- 1 Surat Kesanggupan Meningkatkan kinerja
- 2 Surat Bersedia diaudit
- 3 Dokumen Pola Tata Kelola
- 4 Dokumen Standar Pelayanan Minimal
- 5 Dokumen Rencana Strategis
- 6 Laporan Keuangan

Rincian Layanan Pra BLUD

1. Rincian Layanan Pendampingan Persiapan BLUD :

Pendampingan
Selama ± 4 bulan



4

HASIL REVIEW DAN PENILAIAN
DOKUMEN ADMINISTRATIF
BLUD

Penyerahan hasil review dan penilaian oleh tim konsultan atas penyusunan dokumen administratif BLUD yang dibuat oleh klien.

5

PENDAMPINGAN PENGAJUAN
PENERAPAN BLUD KE KEPALA
DAERAH

Sebagai tenaga ahli dalam mendampingi klien untuk mengajukan penerapan BLUD

Output
Pendampingan
Persiapan Penerapan
BLUD :

1 Review note

2 Cover Letter

Rincian Layanan Pra BLUD

2. Rincian Layanan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD :

**Penyusunan Dokumen
Selama ± 4 bulan via online dan offline**



Rincian Layanan Pra BLUD

2. Rincian Layanan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD :

**Pendampingan
Selama ± 4 bulan**

4

PENDAMPINGAN PENGAJUAN PENERAPAN BLUD KE KEPALA DAERAH

C

Sebagai tenaga ahli dalam
mendampingi klien untuk
mengajukan penerapan
BLUD

Layanan Pelatihan dan Pendampingan **Syncore BLUD Lainnya**

Untuk menunjang terlaksananya implementasi PPK BLUD sesuai dengan peraturan berlaku, Syncore BLUD memberikan layanan berupa:

**Pelatihan/Pendampingan
Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah**

1

**Pelatihan/Pendampingan
Perhitungan Unit Cost
sebagai Dasar Penyusunan
Pola Tarif BLUD**

2

**Pelatihan/Pendampingan
Remunerasi**

3

**Pelatihan/Pendampingan
Pembentukan dan
Penguatan SPI BLUD**

4

**Pelatihan/Pendampingan
Penyusunan laporan
keuangan bagi tenaga
akuntansi**

5

**Pendampingan Persiapan
Penerapan BLUD**

6

**Penyusunan Dokumen
Administratif Penerapan
BLUD**

7

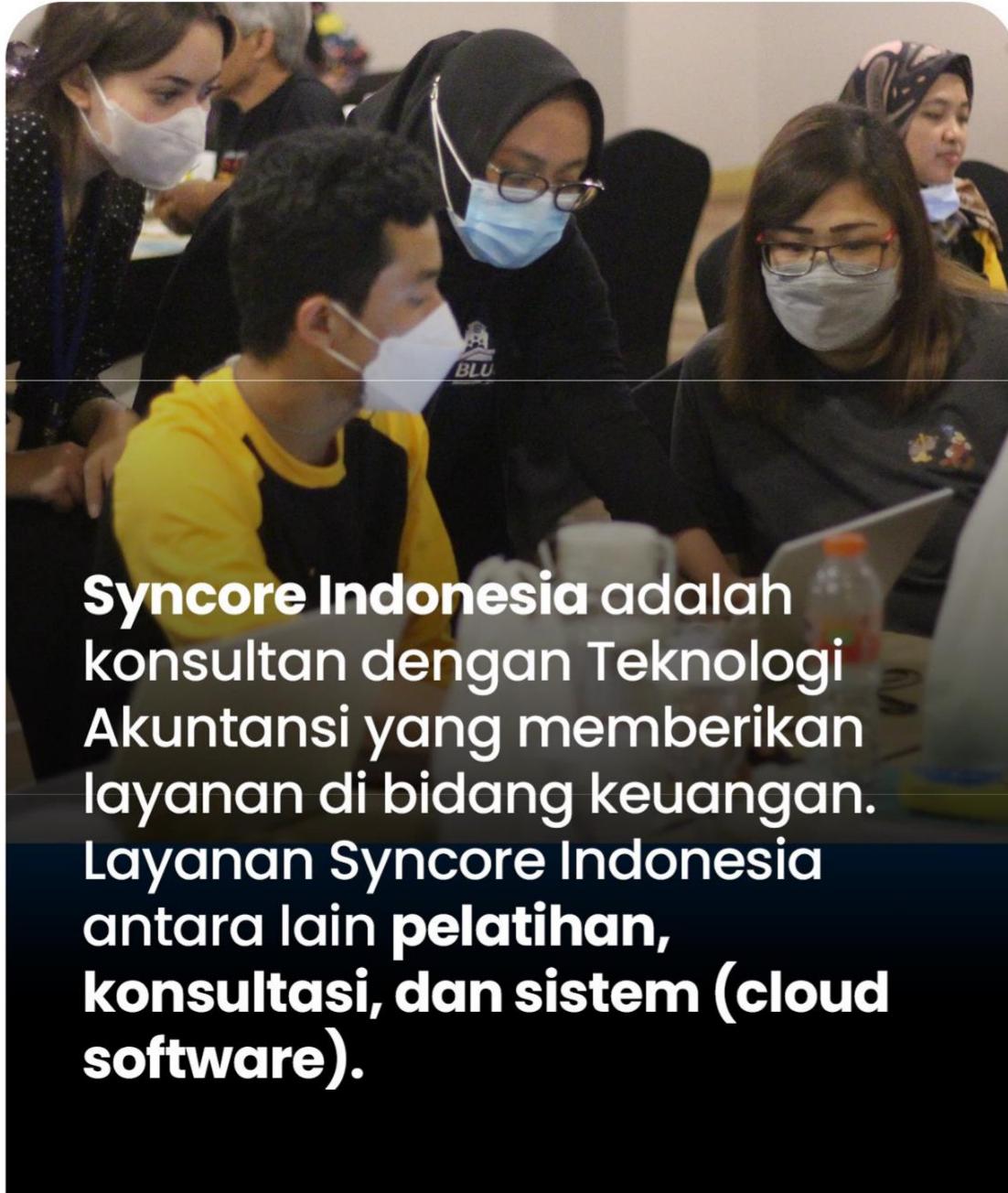
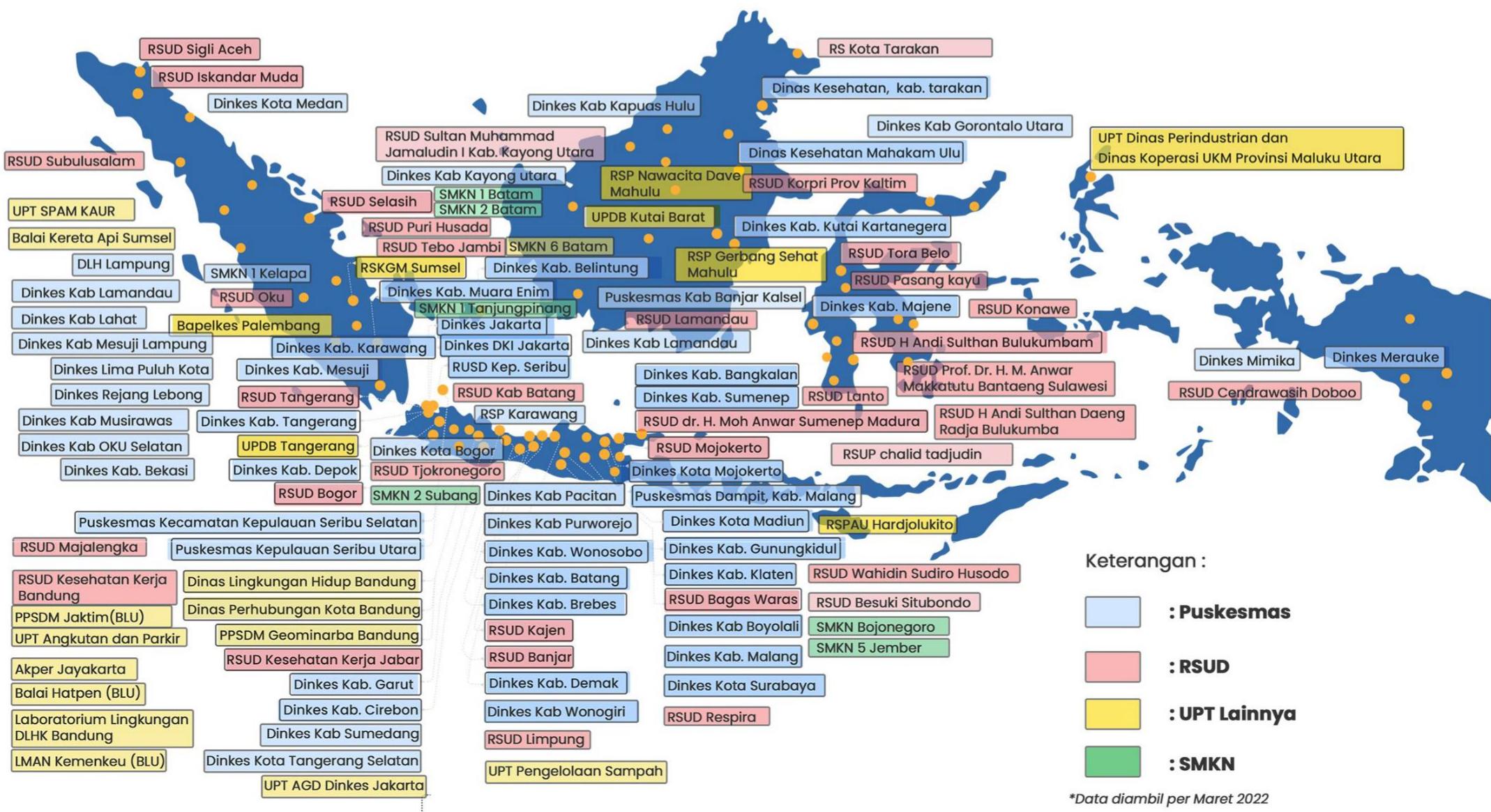
**Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah**

8

Profile **BLUD**

Peta Mitra

Syncore BLUD



Syncore Indonesia adalah konsultan dengan Teknologi Akuntansi yang memberikan layanan di bidang keuangan. Layanan Syncore Indonesia antara lain **pelatihan, konsultasi, dan sistem (cloud software)**.

Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli 2010 yang memberikan jasa konsultan manajemen bisnis dan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Syncore Indonesia kini memberikan layanan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, kami telah mendampingi lebih dari 1.100 instansi, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Narasumber



Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M, CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi, tenaga ahli serta **narasumber BLUD yang berpengalaman dalam melakukan lebih dari 1000 pelatihan dan pendampingan**. Beliau juga terlibat dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Partner Narasumber Dan Praktisi



Dr Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ak., CA

Dosen Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta, mantan
auditor senior,
berpengalaman lebih 300
(tiga ratus) pelatihan dan
pendampingan.

Andri Yandono, SE, MM

Dewan pengawas RSUD
Kota Yogyakarta dan
RSUD Panembahan
Senopati Bantul, Kepala
Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
Bantul, tim penilai BLUD
Kabupaten Bantul.

Soni Haksomo, SE, M.Si

Kasubag keuangan
RSUD Kota Yogyakarta

- **Tim pendamping BLUD Syncore**

Partner

PARTNER KAMI



Dinkes Kabupaten Lahat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara



Dinas Kesehatan
Kab. Lim a Puluh Kota



Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau



Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo



DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOGIRI



SMKSAB
SMK NEGERI 1 BATAM



UNIT PELAYANAN
AMBULANS GAWAT DARURAT
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA



DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KUTAI BARAT



DISHUB
Kota Bandung



ppsdm

GEOMINERBA



Partner



Partner

